

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

2022

RENJA 2023 RENCANA KERJA



JALAN ANDI MALLOMBASSANG NO.72

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK & PERSANDIAN





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alamat : Jl. Andi Mallombassang, Sungguminasa – kode pos 92111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA, Statistik dan Persandian Kabupaten
Gowa
NOMOR : 005 TAHUN 2022
TENTANG

RANCANGAN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN GOWA TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KAB. GOWA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah, perlu disusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa, tentang Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tanggung Jawab Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6123);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yg membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan lembaran negara RI noor 6485);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 1).

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 23);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 N0.11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 Nomor 10);
24. Peraturan Bupati Gowa Nomor 18 A Tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023;
- KEDUA : Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 adalah dokumen rancangan perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa c.q. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkandi:Sungguminasa
pada tanggal : 18 Januari 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa Tahun 2023 telah selesai disusun sebagaimana mendasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam, Peraturan Bupati Gowa Nomor 18 A Tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan mengacu Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 – 2026, maka disusunlah Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang berisikan program dan kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah untuk 1 (satu) tahun.

Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa Tahun 2023.

Gowa, 18 JANUARI 2022



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	19
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	23
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	35
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	37
3.3 Program dan Kegiatan	39
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..	40
BAB 5 PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	9
Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
Tabel 2-3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 202.....	23
Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Pemerintah Daerah Kab. Gowa.....	41
Tabel 4-1 Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika ,Statistik dan Persandian Kab. Gowa Tahun 2023.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daera.....	
Gambar III.1 Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Kabupaten.....	38

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian *tujuan (comon goals)* dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Peraturan Bupati Gowa Nomor 18 A Tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan RKPD Tahun 2021 dan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 - 2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Kominfo,SP Tahun 2023 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah
Tingkat II di Sulawesi Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

- Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50/3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2003-2013; (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 24 Seri E);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 1);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 N0.11);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor.....Tahun..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun Nomor);
 20. Peraturan Bupati Gowa Nomor Tahun tanggal tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyusunan Renja Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 mempunyai tujuan dan maksud, antara lain :

1. Tujuan
 - a. Memberikan arahan, acuan dan pedoman bagi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target yang telah ditetapkan pada tahun 2023.
 - b. Menjadi dasar koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan dalam mencapai tujuan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan;
 - c. Menjadi dasar pengendalian (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2023.
2. Maksud
 - a. Menterjemahkan Resntra Dinas Kominfo, SP dalam dokumen perencanaan tahunan.
 - b. Implementasi tugas dan fungsi serta mandat lainnya di Dinas Kominfo, SP untuk pelaksanaan tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Rencana Kerja beserta Pendanaan Program Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa

BAB 5 PENUTUP

BAB 2 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Ada beberapa perubahan nomenklatur Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi Informatika dan Urusan Statistik Persandian pada tahun 2020 dan 2021 yang sudah disesuaikan dengan hasil pemetaan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 sebagai berikut :

Program dan Kegiatan 2022

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEBAGAI BERIKUT:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
 - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
 - Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten
 - Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
 - Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
 - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
 - Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Program dan Kegiatan 2023

A. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD
 - Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
 - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas
- 3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
 - Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten Cerdas dan Kota Cerdas
 - Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
 - Sub Kegiatan Penetapan kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaring komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.
 - Sub Pelaksanaan Analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota
 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
 - Sub Koordinasi dan Sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, Analisis dan desiminasi Data Statistik Sektoral

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENJA 2021-2026



Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

Lembar: 1 dari 38

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Thn 2022(n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2022 (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika			-	100%					
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan penunjang urusan Perencanaan Pembangunan Daerah			100%					
				-						

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

				Perencanaan, Penganggaran, dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah	ersentase ketersediaan dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja	100%		6 Dokumen			100%	100%	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	9 Dokumen	3 Dokumen	9 Dokumen	3%	3 Dokumen	21 Dok	7%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	3%	2 Dokumen	14 Dokumen	7 %
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan kegiatan administrasi keuangan yang dilaksanakan						100%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 orang	114 orang	38 orang	38 orang	100%	38 orang	190 orang	5%
				Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	7 orang	21 orang	7 orang	21 orang	3%	7 orang	49 orang	7%
				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	12 Dokumen	36 Dok	12 Dokumen	36 Dokumen	3%	12 Dokumen	84 Dok	7%

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

				Penyusunan pelaporan dan analisis Prognosis realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	3 Dok	1 Dokumen	3 Dokumen	100%	1 Dokumen	7 Dok	7%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah operasional administrasi Umum						100%	100%	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 jenis		7 jenis	7 jenis	100%	7 jenis	14 jenis	2%
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis		2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	6 jenis	3%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 jenis		2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	6 jenis	3%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3 jenis		3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	9 jenis	3%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi Kepegawaian								
				<i>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya</i>	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	53 pasang	159 pasang	0	0	0	53 pasang	212 pasang	4%
				Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan jasa Komunikasi Telepon, listrik dan Sumber daya air kantor								
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	0		0	0	0	3 Jaringan	3 jaringan	0

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara							
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 jenis	12 jenis	4 jenis	12 jenis	3%	4 jenis	28 jenis 0,79%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	39 unit	117 unit	39 unit	117 unit	3%	39 unit	273 unit 7%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Ruang	3 ruang	1 Ruang	3 Ruang	3 % %	1 Ruang	7 ruang 7%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah							
				Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	6 Aplikasi	7 Aplikasi	6 Aplikasi	7 Aplikasi	1,16%	6 Aplikasi	20 Aplikasi 7%
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 jenis	30 jenis	10 jenis	30 jenis	3%	10 jenis	70 jenis 3,3%
				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						100%	100%

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yg menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah					100%	100%		
				Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	16 orang	48 orang	16 orang	48 orang	100%	16 orang	112 orang	7%
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	15 Media	45 media	15 Media	45 Media	100%	15 Media	105 Media	7%
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan kemitraan dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	9 Kelompok	27 kelompok	9 Kelompok	27 Kelompok	3 %	9 Kelompok	63 Kelompok	7,6%
				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi						100%		
				Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase kegiatan, perangkat daerah dan pelayanan publik pd pemerintah daerah yg dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain						100%		
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistim jaringan intra pemerintah daerah	2 Koneksi Internet	6 koneksi	2 Koneksi Internet	6 koneksi	3%	2 Koneksi Internet	14 Koneksi	7%
				Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase OPD yg terhubung dengan internet yg disediakan oleh kominfo						100%		

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

				Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan Smart city	3 Jenis	9 jenis	3 Jenis	9 Jenis	3%	3 jenis	21 jenis	7%
				Penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	23 jenis	69 jenis	23 jenis	69 jenis	3%	23 jenis	161 jenis	7%
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	10 orang	30 orang	10 orang	30 orang	3%	10 orang	70 orang	7%
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	9 orang	27	9 orang	27 orang	3%	9 orang	57 Orang	6,3%
				Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	0		0	0		0		0
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan						100%		

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

				daerah kabupaten/kota									
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	1 Aplikasi	3 Aplikasi	3%
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pola hubungan Komunikasi Sandi antar perangkat Daerah					100%			
				Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi	1 Kegiatan	3 Kwggiatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	3 %	1 Kegiatan	7 Kegiatan	7%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo,SP

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026. Tabel 2-2 merupakan Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.

**Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja
Pelayanan Diskominfo,SP**

NO	Indikator	SP M/ standa r nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2020 (n-2)	Thn 2021 (n-1)	Thn 2022 (n)	Thn 2023 (n+1)	Thn 2020 (n-2)	Thn 2021 (n-1)	Thn 2022 (n)	Thn 2023 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			100%	100%	100%	100%	25 %	100%	100 %	100%	1. Meningkatkan inovasi dalam menyelenggarakan pelayanan informasi untuk mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien; 2. Meningkatkan koordinasi dan pendampingan PPID Pembantu dalam memenuhi kewajiban Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	1 Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan komunikasi 2 Terkoneksinya Internet di SKPD untuk ASN dan

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			100%	100%	100%	100%	25 %	100%	100%	100%	1. Tersedianya data informasi statistik sektoral daerah
3	Terlaksananya pengamanan informasi dilingkup Pemkab Gowa			100%	100%	100%	100%	60%	100%	100%	100%	1 Cakupan informasi yang tersebar luas ke khalayak

Capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2020 – 2023 Target Program dan Capaian Kinerja rata- rata belum mencapai 100 %

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai. apabila dibandingkan dengan target kinerja akhir periode Rencana Strategis 2016-2021 yang ditargetkan 100% di 2021, Tetapi hasil capaian Program yg belum mencapai 100 % dikarenakan Anggaran yang belum menunjang dan SDM masih kurang di bidangnya juga akibat dampak Covid-19 maka diperlukan evaluasi dan perbaikan mendalam demi mencapai capaian kinerja yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan pengelolaan informasi daerah dengan Persentase publikasi informasi daerah bagi seluruh Bidang dapat disimpulkan sudah berhasil dengan capaian realisasi kinerja sudah mencapai kurang lebih hampir 100 %.

Kendala Capaian kinerja tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan pengelolaan informasi daerah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Keterbatasan Anggaran akibat revocussing Anggaran untuk penanganan Covid – 19
- b. Perubahan sistem keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat menjadi klarifikasi clustering;
- c. Adanya pandemi Covid 19 yang membuat persiapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik terhambat, karena koordinasi yang dilakukan secara online;

- d. Anggaran persiapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat banyak yang dirasionalisasi untuk penanganan pandemic Covid 19;
- e. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) selalu pengelola Kegiatan.

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan dalam pencapaian sasaran Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian antara lain:

- a. Meningkatkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dalam menyediakan, mengumumkan, mengelola dan melayani permintaan informasi publik;
- b. Menyediakan informasi yang berkualitas dalam mendukung keterbukaan informasi publik.
- c. Meningkatkan inovasi dalam menyelenggarakan pelayanan informasi untuk mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien;
- d. Meningkatkan koordinasi dan pendampingan PPID Pembantu dalam memenuhi kewajiban Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Pusat;
- f. Koordinasi dan komunikasi dengan Komisi Informasi Pusat dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik;
- g. Meningkatkan Jaringan Server agar semua OPD dapat leluasa menggunakan Jaringan yang disediakan oleh Diskominfo Kab. Gowa
- h. Meningkatkan Pengelolaan data Sektoral
- i. Meningkatkan Sistem pengelolaan dan pengamanan Informasi Persandian
- j. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka pengembangan e-government Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa masih mengalami beberapa tantangan, diantaranya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Selain itu Pemerintah Daerah juga dituntut untuk memberikan akses informasi ke masyarakat tanpa terkecuali. Kondisi demikian mengharuskan setiap Badan Publik di Pemda Kabupaten Gowa menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat, dengan

memperhatikan batasan sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Semangat meningkatkan pelayanan publik selaras dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa dimana dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, Badan Publik wajib menyelenggarakan dan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki kewenangan dalam penyediaan informasi publik yang berkualitas. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi baik keluhan ataupun masukan kepada Pemda Kabupaten Gowa melalui aplikasi . Selain itu aplikasi ini mampu berperan sebagai sarana dalam menjembatani masyarakat dan pemerintah dalam komunikasi pelayanan pengaduan masyarakat, yang telah diintegrasikan dengan Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Laporan dan Whiste Blowing System (WBS). Keluhan masyarakat merupakan salah satu bentuk aspirasi yang cukup menjadi fokus pelayanan publik saat ini. Masukan dan keluhan masyarakat dapat dijadikan bahan evaluasi dalam peningkatan layanan publik di Pemda Kabupaten Gowa. Selain melalui aplikasi , masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui media sosial, email atau telepon Yang telah mempunyai tim CSIRT yang bertanggungjawab terhadap keamanan informasi di Pemda Kabupaten Gowa.

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemda Kabupaten Gowa yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi setiap tahunnya selalu dievaluasi oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan Kabupaten Gowa tinggal menyelesaikan Dokumen dan Struktur (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dievaluasi oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Aspek penilaian dalam SPBE meliputi domain kebijakan (aspek kebijakan tata kelola dan aspek kebijakan pelayanan), domain tata kelola (aspek kelembagaan, aspek strategi dan perencanaan dan aspek TIK) dan domain layanan (aspek administrasi pemerintah dan aspek pelayanan publik). Pemanfaatan TIK dalam Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian meliputi infrastruktur jaringan, aplikasi dan keamanan informasi.

Perkembangan teknologi dan trend pemanfaatan teknologi pada penyediaan layanan publik, menuntut peran pemerintah yang tidak hanya sebagai penyedia layanan namun juga sebagai fasilitator yang berfungsi untuk menjembatani semua stakeholder dalam berkontribusi untuk mewujudkan visi daerah.

Meskipun pemanfaatan teknologi sudah begitu maju, seringkali masih ditemui adanya gap yang terjadi antara kebutuhan masyarakat dengan fasilitas layanan yang disediakan oleh pemerintah. Dibutuhkan Big Data untuk mendukung peningkatan layanan publik kepada masyarakat. Perencanaan, penganggaran, investasi dan implementasi TIK untuk mendukung pelayanan publik harus berpedoman pada Peraturan Daerah. Pemda Kabupaten Gowa memiliki Peace Room untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat sehingga pelayanan publik kepada masyarakat lebih maksimal). Manfaat dari Peace Room adalah ruang/tempat untuk melakukan beberapa hal terkait video conference, analytic data, dan monitoring terhadap rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Gowa. Untuk saat pandemic covid 19,



RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

lebih banyak yang dipergunakan untuk memfasilitasi video conference dari berbagai lintas OPD di Pemda Kabupaten Gowa yang akan melakukan aktivitas secara daring dengan jumlah peserta yang banyak. Selain itu Pemerintah Kabupaten Gowa telah mendistribusikan bandwidth yang tersebar di 54 OPD wilayah Kabupaten Gowa.

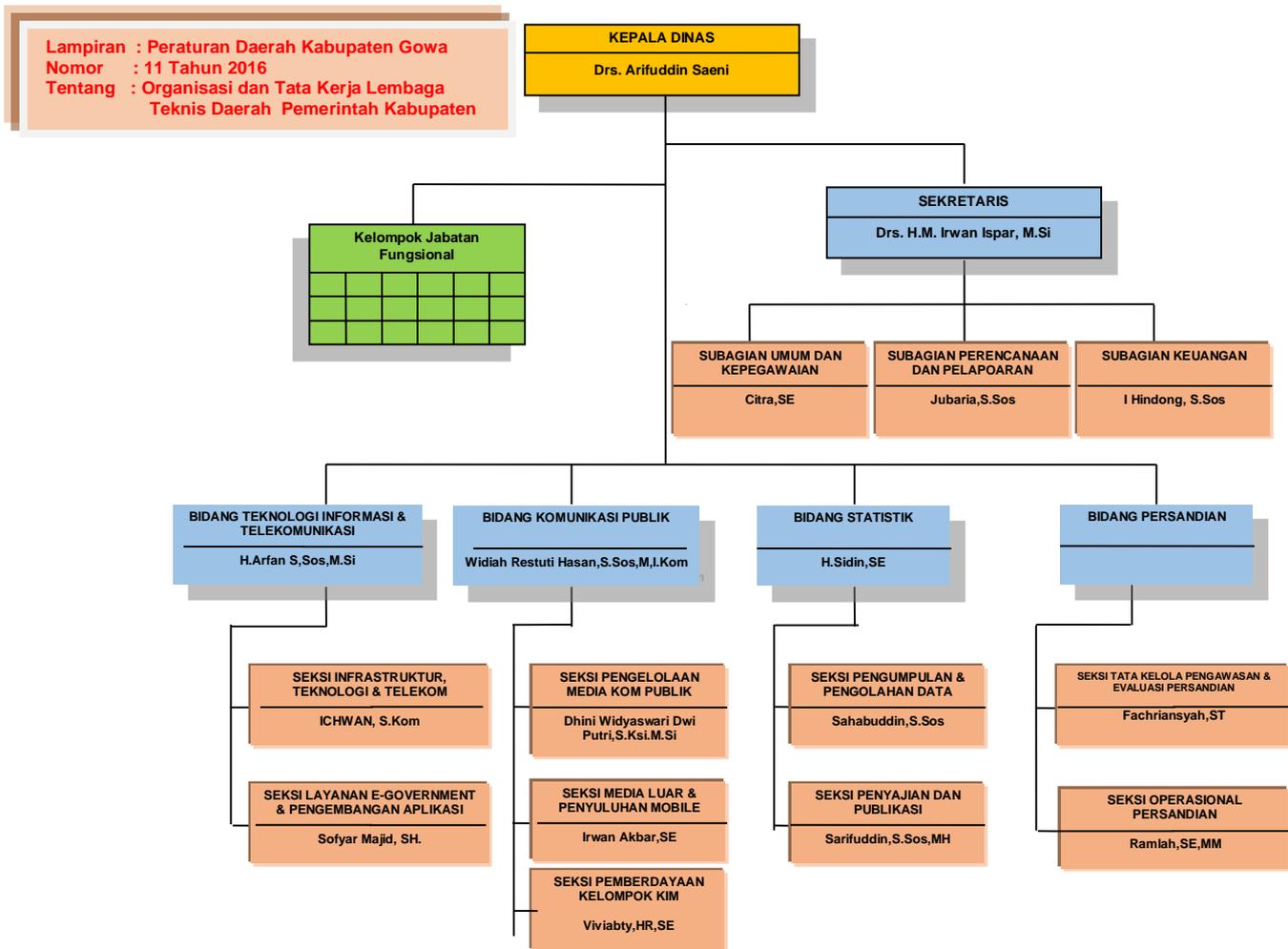
Dengan supporting Teknologi Informasi diharapkan peran aktif masyarakat untuk memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Peran masyarakat saat ini yang tidak hanya berperan sebagai obyek pembangunan tetapi juga berperan menjadi subyek pembangunan perlu mendapatkan ruang terutama dalam melakukan usulan terhadap pembangunan di wilayahnya maupun monitoring terhadap kinerja pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa sebagai sebuah Perangkat Daerah yang berfungsi untuk melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Komunikasi dan Informatika dan di Bidang Persandian, memiliki isu strategis sebagai berikut:

1. Melaksanakan keterbukaan informasi publik bagi semua Badan Publik di lingkup Pemda Kabupaten Gowa sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang akuntabel
2. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam seluruh pelayanan publik publik yang diselenggarakan oleh Pemda Kabupaten Gowa yang mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. SPBE merupakan salah satu komponen dalam Reformasi Birokrasi.
3. Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data terpadu dan terintegrasi sebagai suatu wujud kesatuan data pembangunan untuk mewujudkan visi daerah dan mendukung peningkatan layanan publik kepada masyarakat.
4. Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk mendukung pelayanan publik yang efektif, transparan dan akuntabel serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Gowa dalam hal yang positif.
5. Melaksanakan literasi informasi kepada masyarakat melalui berbagai media informasi guna mencegah terjadinya penyebaran informasi yang tidak benar (hoax) yang dapat meresahkan dan memecah kesatuan bangsa Indonesia.

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah



**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

**Tabel 2-3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Pemerintah Daerah KABUPATEN GOWA**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Gowa

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Prog/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				10.140.656.204	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				10.140.656.204	
1	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Diskomi nfo,SP	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan penunjang urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	13.603.082.74 4	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Diskomi nfo,SP	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan penunjang urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	13.603.082.74 4	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daera	Diskomi nfo,SP	Persentase ketersediaan dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	60.186.789	Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskomi nfo,SP	Persentase ketersediaan dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	Rp. 60.186.789	Sesuai dengan rancangan awal RKPD, target capaian sudah d disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	16.421.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	Rp 16.421.000	s.d.a

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Prog/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	26.500.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Rp 26.500.000	s.d.a
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	17.265.789	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Rp 17.265.789	s.d.a
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo,SP	Cakupan kegiatan administrasi keuangan yang dilaksanakan	100%	3.289.788.038	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo DIY	Cakupan kegiatan administrasi keuangan yang dilaksanakan	100%	3.289.788.038	Sesuai dengan rancangan awal RKPD, target capaian sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	3.208.787.038	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	3.208.787.038	s.d.a
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaana Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	69.908.000	Sub Kegiatan Pelaksanaana Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	69.908.000	s.d.a

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

1.2 .3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	7.340.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan	7.000.000	s.d.a
-----------	--	--	--	------------	-----------	--	--	--	------------	-----------	-------

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Prog/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.2 4	Sub Kegiatan Penyusunan pelaporan dan analisis Prognosis realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6.753.000	Sub Kegiatan Penyusunan pelaporan dan analisis Prognosis realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6.753.000	s.d.a
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disko minfo ,SP	Jumlah operasional administrasi Umum	100%	791.943.767	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disko minfo ,SP	Jumlah operasional administrasi Umum	100%	791.943.767	Sesuai dengan rancangan awal RKPD, target capaian sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan
1.3 .1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	1.293.980	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	6.700.000	s.d.a
1.3 .2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.724.372	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.724.372	s.d.a
1.3 .3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	31.514.415	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	31.514.415	s.d.a

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

1.3 .4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	757.411.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	757.411.000	s.d.a
-----------	---	--	---	-----------	-------------	---	--	---	-----------	-------------	-------

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Prog/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disko minfo ,SP	Jumlah administrsai Kepegawaian	100%	40.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskomi nfo DIY	Jumlah administrsai Kepegawaian	100%	40.000.000	Sesuai dengan rancangan awal RKPD, target capaian sudah disesuaikan dengan kebutuhanyang diperlukan
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	53 Paket	40.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	53 Paket	40.000.000	s.d.a
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disko minfo ,SP	Jumlah Layanan jasa Komunikasi Telepon, listrik dan Sumber daya air kantor	100%	55.307.934	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskomi nfo DIY	Jumlah Layanan jasa Komunikasi Telepon, listrik dan Sumber daya air kantor	100%	55.307.934	Sesuai dengan rancangan awal RKPD, target capaian sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 jenis laporan	55.307.934	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 jenis laporan	55.307.934	s.d.a
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Disko minfo, SP	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	100%	183.081.200	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Diskomi nfo DIY	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	100%	183.081.200	Sesuai dengan rancangan awal RKPD, target capaian sudah disesuaikan dengan



**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

	Pemerintahan Daerah					Daerah					kebutuhanyang diperlukan

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Prog/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.6 .1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 jenis 2 unit	120.021.200	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 jenis 2 unit	120.021.200	s.d.a
1.6 .2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	43.110.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	43.110.000	s.d.a
1.6 .3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	19.950.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	19.950.000	s.d.a
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disko minfo	Jumlah pengadaan barang milik daerah	100%	846.675.525	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan barang milik daerah	100%	846.675.525	Sesuai dengan rancangan awal RKPD, target capaian sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan
1.7. 1	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	6 unit	153.382.000	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	6 unit	153.382.000	

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

No	Rancangan Awal RKP 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Prog/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.7. 2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	693.296.525	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit		
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKAS IPUBLIK		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80%	2.575.967.751	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80%	3.692.135.000	
2.1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Kab. Gowa	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yg menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah	100%	2.575.967.751	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah DaerahProvinsi		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yg menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah	100%	2.580.690.500	Sesuai dengan rancangan awal RKP, target capaian sudah d disesuaikan dengan kebutuhanyang diperlukan
2.1 .1	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	226.564.600	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	21 program siaran 1 Aplikasi mobile android	226.564.600	s.d.a
2.1 .2	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	2.348.878.400	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	15 Media, Website humas diposisi #723.830, Media cetak 87 kali tayang,TV 137 kali tayang,Medi a online 20 media	2.348.878.400	s.d.a

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

No	Rancangan Awal RKPd 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Prog/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
2.1.3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	5.247.500	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	10 Kelompok	5.247.500	s.d.a
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	2.223.033.200	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	2.223.033.200	
3.1	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Kab. Gowa	Persentase kegiatan, perangkat daerah dan pelayanan publik pd pemerintah daerah yg dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain	100%	1.635.000.000	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten		Persentase kegiatan, perangkat daerah dan pelayanan publik pd pemerintah daerah yg dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain	100%	1.635.000.000	Sesuai dengan rancangan awal RKPd, target capaian sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan
3.1.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	1.635.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2 Koneksi Internet	1.635.000.000	s.d.a

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

3.2	Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Kab. Gowa	Persentase OPD yg terhubung dengan internet yg disediakan oleh kominfo	100%	588.033.200	Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten		Persentase OPD yg terhubung dengan internet yg disediakan oleh kominfo	100%	588.033.200	s.d.a
-----	--	-----------	--	------	-------------	--	--	--	------	-------------	-------

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Prog/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.2.1	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten Cerdas dan Kota Cerdas		Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	375.846.200	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten Cerdas dan Kota Cerdas		Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	3 jenis 11 orang	375.846.200	s.d.a
3.2.2	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	100.310.000	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	10 orang Diklat	100.310.000	s.d.a
3.2.3	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	41.877.000	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	9 orang Pengelola WEB	41.877.000	s.d.a
3.2.4	Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	70.000.000	Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	70.000.000	s.d.a

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

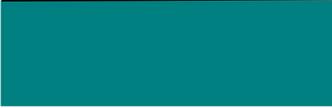
No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Prog/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
B	URUSAN PEMERINTAHAN AN BIDANG PERSANDIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				2.289.500.000	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN AN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	27.592.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	27.592.000	
4.1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Gowa	Jumlah Kompilasi statistik sektoral yg mendapat rekomendasi dari BPS	100%	27.592.000	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Kompilasi statistik sektoral yg mendapat rekomendasi dari BPS			Sesuai dengan rancangan awal RKPD, target capaian sudah d disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan
4.1. 1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	orang	12.592.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	1 Dokumen	12.592.000	s.d.a
4.1. 2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, Analisis dan desiminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	15.000.000	Sun Kekuatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, Analisis dan desiminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	15.000.000	s.d.a

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Prog/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
C	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERSANDIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
5	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Terlaksananya pengamanan informasi dilingkup Pemkab Gowa	100%	38.180.000	PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Terlaksananya pengamanan informasi dilingkup Pemkab Gowa	100%	38.180.000	
5.1	Kegiatan Penyelenggara an Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota	Kab. Gowa	Persentase OPD yg menyelenggara n Persandian untuk pengamanan informasi	100%	38.180.000	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota		Persentase OPD yg menyelenggara n Persandian untuk pengamanan informasi	100%	38.180.000	Sesuai dengan rancangan awal RKPD, target capaian sudah d disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan
5,1, 1	Sub Kegiatan Penetapan kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaring komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / kota		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1 Dokumen	25.000.000	Sub Kegiatan Penetapan kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaring komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / kota		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1 Dokumen	25.000.000	s.d.a

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Prog/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	laporan	14.590.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Aplikasi 46 Kelurahan pelaksanaan Indeks TTE	14.590.000	s.d.a
5.2	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Gowa	Peningkatan pola hubungan Komunikasi Sandi antar perangkat Daerah		8.900.000	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Gowa	Peningkatan pola hubungan Komunikasi Sandi antar perangkat Daerah		8.900.000	Sesuai dengan rancangan awal RKPD, target capaian sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan
5.2.1	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat daerah	8.900.000	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1210 pucuk berita/dokumen	8.900.000	s.d.a



RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 membahas Perencanaan Program Kegiatan Tahun 2023, yang mencakup target program kegiatan beserta anggarannya. Program kegiatan tahun anggaran 2023 berasal dari anggaran APBD terdiri dari Lima (5) program, Tigabelas (13) kegiatan dan tiga puluh dua (32) sub kegiatan. Sedangkan bersumber pada anggaran khusus terdiri dari satu (1) program, satu (1) kegiatan dan satu (1) sub kegiatan. Program yang mendukung dalam pencapaian sasaran ada tiga (3) program sedangkan satu (1) program sebagai pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Sedangkan program yang mendukung capaian sasaran ada empat (4) yaitu Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Perencanaan anggaran program kegiatan pada tahun 2023 yang bersumber dari anggaran APBD sebesar Rp. 10.140.656.204,00. Berdasarkan Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian menghasilkan kesepakatan diantaranya bahwa perencanaan dan penganggaran program kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian telah sesuai dengan rancangan awal RPKD 2023 dan target capaian yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Dengan demikian program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Gowa sudah sejalan dan bisa mengakomodasi kebutuhan *stakeholder* Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Gowa.

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika diarahkan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mendukung kebijakan nasional tersebut maka sesuai dengan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

- a. terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
- b. tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
- c. terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman
- d. terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pada Urusan Komunikasi dan Informatika Kebijakan tentang pentingnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah telah yang tiap tahunnya dievaluasi oleh oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 59 tahun 2020 bahwa lingkup pelaksanaan SPBE ada pada 4 domain. Domain tersebut antara lain domain kebijakan (aspek kebijakan tata kelola dan aspek kebijakan pelayanan), domain tata kelola (aspek kelembagaan, aspek strategi dan perencanaan dan aspek TIK) dan domain layanan (aspek administrasi pemerintah dan aspek pelayanan publik). Pemanfaatan TIK dalam Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi infrastruktur jaringan, aplikasi dan keamanan informasi. Untuk meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan keterpaduan antar stakeholder dalam mewujudkan sebuah tata kelola yang yang efektif.

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian membangun interaksi Pemda dengan masyarakat untuk penyerapan aspirasi publik melalui email, telepon, media Elektronik, media sosial, dan aplikasi Kabupaten Gowa serta aplikasi aduan juga telah diintegrasikan dengan Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan *Whistle Blowing System* (WBS).

Untuk menunjang kelancaran dalam penerapan teknologi Informasi di Pemda Kabupaten Gowa tahun 2022 jaringan yang terkoneksi dengan jaringan Fiber Optik sebanyak 54 titik, wireless 9 titik,. Terdapat beberapa titik yang belum terkoneksi dengan jaringan, dan akan ditindak lanjuti pada tahun berjalan.

Dalam penyebaran informasi di Daerah Kabupaten Gowa mempunyai tantangan tersendiri. Belum semua desa terjangkau sarana informasi yang memadai. Melalui Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa dalam membangun akses komunikasi dan informasi ke desa-desa dilakukan dengan memberdayakan Lembaga Komunikasi Sosial yang diantaranya melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Keberadaan KIM adalah sebagai simpul komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang berperan sebagai penyebar (*disseminator*) informasi kepada masyarakat. Selain itu penyebaran informasi dapat melalui media sosial dan website dikarenakan masyarakat akan lebih mudah menerima dan menyerap informasi yang disampaikan. Beberapa komunitas netizen berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan persandian dalam menangkal berita-berita hoax tentang Pemda Kabupaten Gowa . Hal ini sangat efektif dalam menetralsir berita-berita hoax di masyarakat.

Terkait dengan penyebaran informasi, maka Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa juga telah memiliki Radio pemerintah dengan siarannya dipancarkan pemancar FM dan melalui streaming, juga telah membangun 1 (satu) unit videotron, Tahun 2021 Telah digunakannya Peace Room A'KIO yang merupakan suatu sistem informasi eksekutif telah mengintegrasikan hampir semua OPD dan Khalayak dalam melakukan kegiatan secara virtual, Juga telah mengaplikasikan Disposisi On Line untuk Tanda Tangan On Line yang sudah digunakan di Pemerintah Kabupaten Gowa. terdapat integrasi aplikasi mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian, sehingga memudahkan Kepala Daerah dalam proses pengambilan keputusan ataupun hanya sekedar memantau perkembangan serapan anggaran di masing-masing OPD

Pada Urusan Keamanan dan persandian lingkungan Pemda Kabupaten Gowa sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dan (b) melakukan pembinaan penyelenggaraan persandian ke kabupaten/kota se-Kabupaten Gowa dalam hal Pemda Kabupaten Gowa sebagai wakil pemerintah pusat. Disamping itu juga dalam rangka penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Kebijakan tentang pentingnya keamanan informasi di lingkungan pemerintahan telah dituangkan dalam Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019 terkait teknis penyelenggaraan urusan persandian dan Keamanan Informasi di Pemerintah Daerah. Untuk menindaklanjuti peraturan tersebut Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian membentuk TIM Gowakab_CSIRT yang berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Nomor 5/1/2022, yang beranggotakan 13 Orang Lingkup Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa, juga Perbub no. 34 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola Penggunaan Sertifikat Elektronik.

Tim CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) bertujuan untuk merespon insiden keamanan informasi yang terjadi pada seluruh SKPD (54 SKPD) Pemda Kabupaten Gowa yang menggunakan local area network. Insiden keamanan informasi adalah setiap kejadian yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem komputer, seperti serangan virus, akses ilegal, kebocoran informasi, serangan DDOS dan lain sebagainya. Tujuan utama dari respon/tanggapan terhadap insiden adalah untuk menghentikan insiden agar tidak menyebar serta agar sistem yang terinfeksi dapat beroperasi secara normal. Sehubungan dengan keamanan informasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa telah berhasil mendapatkan Sertifikasi (CSCU) Certified Secure Computer User untuk lingkup Kabupaten Gowa, dan dengan adanya PP Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan urusan Persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan pembangunan urusan komunikasi dan informatika, yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Gowa adalah meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, hal ini sesuai dengan visi Kabupaten Gowa "**TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK**" yang digambarkan dalam "*Tiga Kata Kunci*", dimana Tiga Kata kunci yang ke-Tiga "Kondisi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Terbaik berkinerja sangat tinggi dengan pelayanan publik yang berkualitas.", memberikan substansi penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa untuk menata birokrasi pemerintahan yang menekankan pada "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal OPD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar OPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar OPD). Untuk itu arah program dan kegiatan dilakukan untuk menunjang perbaikan kualitas kelembagaan berdasar pada *vision driven organization*.

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Gowa yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama lima tahun. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa, antara lain:

1. Tujuan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian :

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT

Indikator Tujuan

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

2. Sasaran Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

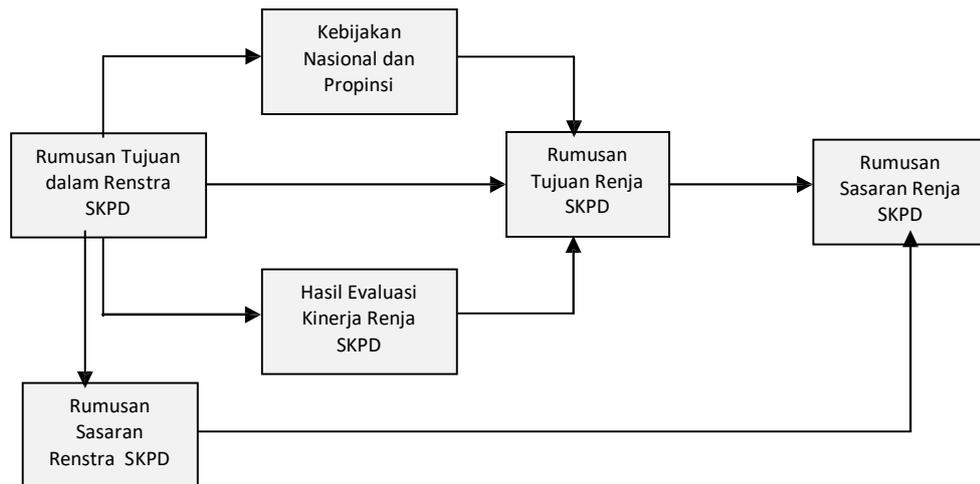
Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan pengelolaan informasi daerah

Indikator Sasaran

Persentase publikasi informasi daerah

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD seperti terlihat pada bagan di bawah ini :

**Bagan III.1
PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD KABUPATEN**



Perwujudan dari penguatan kebijakan ketatalaksanaan untuk mendorong proses birokrasi yang sederhana, cepat dan terintegrasi serta membuka ruang partisipasi publik adalah dengan mendorong implementasi teknologi untuk melahirkan kreatifitas dan inovasi dalam membantu proses penyelesaian masalah prioritas dan sektor unggulan daerah, berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif antar wilayah untuk mengakselerasi terwujudnya kehidupan masyarakat Gowa yang lebih sejahtera, sehat, nyaman dan aman.

Menyadari akan Pentingnya keberadaan *Smart City* maupun *Smart Regency* yang akan dibuat di kabupaten Gowa, maka Tahun ini sudah akan dibuat Pengembangan *Smart City/Smart Regency* untuk mewujudkan Kabupaten Gowa Smart Province. Sebagai pilot project implementasi Gowa Smart Province dilaksanakan di kawasan sumbu filosofi, sehingga Dinas Komunikasi Informatika, Statisti dan Persandian kemudian menyusun Masterplan Gowa Smart Area Sumbu Filosofi, yang menjadi pedoman untuk mewujudkan konsep smart city tersebut. Dalam upaya mendorong integrasi dan kolaborasi data akan dibangun Gowa Center, yang selain berfungsi untuk proses kompilasi data, pengumpulan data, mengolah data, menganalisis data dan menyajikan data maka dikembangkan secara lebih jauh untuk berfungsi menyusun rekomendasi kebijakan berbasis data (*evidence base policy*) dalam bentuk *policy brief*. Diharapkan ke depan Gowa Center dapat digunakan bersama oleh unsure pentaheliks dalam bentuk suatu *kolaborative analytics*.

Seiring dalam Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan menjadi suatu keharusan di era keterbukaan informasi saat ini. Dinas Kominfo Kab. Gowa sebagai PPID Utama Pemerintah Kab.Gowa berupaya mendorong peran aktif masyarakat untuk turut mengawasi penyelenggaraan negara agar sejalan dengan kepentingan publik. Selain itu juga mengintensifkan sosialisasi keterbukaan informasi kepada OPD dan Badan Publik di lingkup Daerah Kabupaten Gowa

untuk dapat memperbaharui dan membuat Daftar Informasi Publik yang dapat dengan mudah dan cepat diakses oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan Dinas Kominfo Kab. Gowa terwujudnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel melalui optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya peringkat Pemerintah Kabupaten Gowa dalam pengelolaan informasi publik.

Seluruh pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemda Kabupaten Gowa harus memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi agar mampu memberikan pelayanan yang efektif serta efisien terhadap masyarakat. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) mengevaluasi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan layanan publik. Tujuan SPBE untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dievaluasi oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Aspek penilaian dalam SPBE meliputi domain kebijakan (aspek kebijakan tata kelola dan aspek kebijakan pelayanan), domain tata kelola (aspek kelembagaan, aspek strategi dan perencanaan dan aspek TIK) dan domain layanan (aspek administrasi pemerintah dan aspek pelayanan publik). Pemanfaatan TIK dalam Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi infrastruktur jaringan, aplikasi dan keamanan informasi.

3.3. Program dan Kegiatan

Sejalan dengan Visi Kabupaten Gowa tahun 2021 - 2026 yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK”** dan untuk Terwujudnya Pelayanan Informasi Dan Komunikasi Berbasis Teknologi Menuju Masyarakat Kabupaten Gowa Yang Berdaya Saing Dengan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa tahun 2023 terdiri dari :

a. Program Utama :

- Program Informasi dan Komunikasi Publik
- Program Aplikasi Informatika
- Program Penyelenggaraan Statistik sektoral
- Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi

b. Program Penunjang :

- Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa pada tahun 2022 mempunyai lima (5) program, dua belas (12) kegiatan dan Dua puluh sembilan (32) sub kegiatan. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik sektoral dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi kelima Program ini semuanya berasal dari dana APBD. Program yang mendukung dalam pencapaian sasaran ada empat (4) program sedangkan satu (1) program sebagai pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program yang mendukung capaian sasaran ada empat (4) yaitu Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik sektoral dan Program Penyelenggaraan Persandian. Perencanaan anggaran program kegiatan pada tahun 2021 yang bersumber dari anggaran APBD sebesar Rp. 9.465.885.206.

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

**Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Pemerintah Daerah
Daerah Kabupaten Gowa**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan penunjang urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Kominfo, Stati stk Persandian						
01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja	Dinas Kominfo, Stati stk Persandian	6 Dokumen	Rp 53.078.750	APBD/DAU	6 Dokumen	Rp 60.186.789

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kominfo, Statistik Persandian	3 Dokumen	Rp 25.037.250	APBD/DAU		3 Dokumen	Rp 16.421.000
01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kominfo, Statistik Persandian	1 Dokumen	Rp 17.619.750	APBD/DAU		1 Dokumen	Rp 26.500.000
01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kominfo, Statistik Persandian	2 laporan	Rp 15.619.750	APBD/DAU		2 dokumen	Rp 17.265.789
01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan	Dinas Kominfo, Statistik Persandian	58 Dokumen/ Laporan	Rp 3.289.788.038	APBD/DAU		58 Dokumen/ Laporan	Rp 3.291.448.038
01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dalam Wilayah Negara Indonesia	Orang/bulan	Rp 3.208.787.038	APBD/DAU		38 ASN	Rp 3.208.787.038

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kominfo, Statistik Persandian	Dokumen	Rp 68.908.000	APBD/DAU		Dokumen	Rp 69.908.000	
01	1.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kominfo, Statistik Persandian	Laporan	Rp 6.340.000	APBD/DAU		Laporan	Rp 7.000.000	
01	1.02	08	Penyusunan pelaporan dan analisis Prognosis realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kantor Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Dokumen	Rp 5.753.000	APBD/DAU		Dokumen	Rp 5.753.000	
01	1.06			Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kantor Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	14 Jenis	Rp 690.943.767	APBD/DAU		14 Jenis	Rp 797.349.787	

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kantor Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	paket	Rp 1.293.980	APBD/DAU		paket	Rp 6.700.000
	01	1.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	paket	Rp 1.724.372	APBD/DAU		paket	Rp 1.724.372
	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	paket	Rp 30.514.415	APBD/DAU		paket	Rp 31.514.415
	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kominfo, Stati stk Persandian	Laporan	Rp 657.411.000			Laporan	Rp 757.411.000

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian						Rp. 846.678.525
	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Unit	Rp 153.382.000	APBD/DAU		Unit	Rp 693.296.525
	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Unit	Rp 693.296.525	APBD/DAU		Unit	Rp 153.382.000
	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian						Rp. 40.000.000
	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Paket	27.950.000,-	APBD/DAU		Paket	40.000.000,-

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

	01	1.08		Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah	Dinas Kominfo, Statistik Persandian						
	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Laporan	55.307.934,-	APBD/DAU		Laporan	55.307.934,-
	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Gowa/ Kecamatan						183..081.200
	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Gowa	Unit	60.000.000,-	APBD/DAU		4 unit	120.021.200
01	1.08	02	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab.Gowa/ Kecamatan	Unit	43.110.000	APBD/DAU		39 unit	43.110.000

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

01	1.08	02	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gowa	Unit	19.950.000,-	APBD/DAU		Unit	19.950.000,-
16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gowa						
16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yg menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah	Kab. Gowa						2.580.690.500
16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Gowa/Kec.	Dokumen	Rp 2.348.878.400	APBD/DAU		Dokumen	Rp 2.348.878.400
16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Se-Kab.Gowa	Dokumen	Rp 226.564.600	APBD/DAU		Dokumen	Rp 226.564.600

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Kab. Gowa/Kec.	Dokumen	Rp 5.247.500	APBD/DAU		Dokumen	Rp 5.247.500
16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	OPD dan Camat se-Kabupaten Gowa						
16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase kegiatan, perangkat daerah dan pelayanan publik pd pemerintah daerah yg dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain	Kab. Gowa						1.635.000.000
16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Unit	Rp 1.635.000.000	APBD/DAU		Unit	Rp 1.635.000.000
16	03	1.02		Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase OPD yg terhubung dengan internet yg disediakan oleh kominfo	Kab. Gowa		Rp 609.961.200				

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Gowa	Dokumen	Rp 70.000.000	APBD/DAU		Dokumen	Rp 70.000.000
16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kab. Gowa/ Kec.	Unit	Rp 41.877.000	APBD/DAU		Unit	Rp 41.877.000
16	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Dokumen	Rp 397.774.200	APBD/DAU		Dokumen	Rp 397.774.200
16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Dokumen	Rp 100.310.000	APBD/DAU		Dokumen	Rp 100.310.000

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		Kab. Gowa						
20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Kab. Gowa						
20	02	0.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kompilasi statistik sektoral yg mendapat rekomendasi dari BPS	Kab. Gowa	100%		APBD/DAU		100%	Rp 56.877.000,-
20	02	0.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, Analisis dan desiminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Gowa	Dokumen	Rp 15.000.000	APBD/DAU		Dokumen	Rp 15.000.000
20	02	0.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Kab. Gowa	orang	Rp 12.592.000	APBD/DAU		orang	Rp 41.877.000
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terlaksananya pengamanan informasi dilingkup Pemkab Gowa	Kab.Gowa/ Kecamatan						
21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Persentase OPD yg menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi	Kab. Gowa						
21	02	1.01	01	Penetapan kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaring komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Kab. Gowa	Dokumen	Rp 15.000.000	APBD/DAU		Dokumen	Rp 25.000.000
21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kab.Gowa	Laporan	Rp 17.000.000	APBD/DAU		Laporan	Rp 120.590.000

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

					Kabupaten/Kota							
21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kel./Desa se Kab.Gowa	Laporan	Rp 14.590.000	APBD/DAU		Laporan	Rp 14.590.000
21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pola hubungan Komunikasi Sandi antar perangkat Daerah	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	100%					
21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Perangkat Daerah	Rp 8.900.000	APBD/DAU		Perangkat Daerah	Rp 10.000.000

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

**Tabel 1.1
Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Gowa Tahun 2023**

No	Sasaran	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya layanan penunjang SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.316.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.280.800,-
		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.720.000,-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.315.200,-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	71.310.000,-
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	60.015.000,-
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.065.000,-
		Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.230.000,-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.250.000,-
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	62.250.000,-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	343.070.000
		Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.244.400
		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1.154.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.019.600
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi Dan Konsultasi SKPD	313.652.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	163.302.928,-
		Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	111.302.928,-
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	52.000.000,-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0		

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

No	Sasaran	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	140.489.000,-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	108.799.000,-
2	Meningkatnya layanan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	16.490.000,-
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	15.200.000,-
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	
		Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	2.166.086.080,-
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.879.367.280,-
		Pelayanan Informasi Publik	281.488.800,-
3	Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas	5.230.000,-
		Program Aplikasi Informatika	
		Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	2.000.166.604,-
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.000.166.604,-
		Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	2.184.454.970,-
		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	264.792.900,-
		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1.416.196.450,-
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	46.677.400,-
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	418.245.220,-	
4	Meningkatnya layanan statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Kom	38.543.000,-
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	13.250.000,-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	6.085.000,-
5	Meningkatnya layanan persandian Untuk Pengamanan Informasi pemerintah daerah	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	7.165.000,-

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

No	Sasaran	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	9.295.000,-
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik	9.295.000,-
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	6.805.400,-
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	6.805.400,-
		JUMLAH	7.196.795.982,-

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa

BAB 5 PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan – persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat benar – benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa adalah Program Tahunan Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN) Kabupaten Gowa ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Gowa.

Selain itu, ketersediaan anggaran yang memadai maka semua program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang di inginkan akan tercapai. Sebaliknya bila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang optimal. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan akan berpedoman pada kaidah - kaidah yang sudah ada yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi, visi dan misi kepala daerah Kabupaten Gowa, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, DPA Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa.

Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa untuk melakukan pengelolaan dan penataan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemda Kabupaten Gowa dalam mendukung evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Eletronik (SPBE) serta mengawal *Smart Province*, maka secara terus menerus perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan terhadap rencana kerja tahunan ini untuk mengakomodasi berbagai perubahan/dinamika yang terjadi. Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik.



**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

Formulir E.29

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Rancangan Renja Dinas Kominfo,SP Kabupaten Gowa
Tahun 2023**

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Ada Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Agenda Kerja Perangkat Daerah.	v			
2	Pengolahan data dan informasi	v			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	v			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah tahunlalu berdasarkan Renstra-Perangkat Daerah.	v			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	v			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD.	v			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	v			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	v			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	v			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	v			
10a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota.	v			
10b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerahi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	v			
10c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	v			
10d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai surat edaran Bupati.	v			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	v			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah .	v			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah i telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	v			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.	v			

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**